

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Berlakunya kebijakan otonomi daerah tersebut menyebabkan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang mendasar. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, dan fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten atau kota mendapat wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah, pokok-pokok pendapatan pemerintahan daerah sumber-sumber dari :

1. Pendapatan pajak daerah
2. Pendapatan retribusi daerah
3. Pendapatan laba BUMN dan investasi lainnya
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok dibawah ini:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)

Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.

2. Dana perimbangan

Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu dari pendapatan pajak daerah dan menurut Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, bahwa PBB seluruh penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah setiap daerah harus memiliki faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka kegiatan pelaksanaan harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya juga harus baik. Melihat hal tersebut salah faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan proses pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah
Datar tahun 2011 – 2015

Tahun	Target PAD	Realisasi (PAD)
2011	Rp. 51.823.186.687,33	Rp. 60.100.782.252,00
2012	Rp. 53.029.663.933,00	Rp. 60.004.818.401,88
2013	Rp. 895.079.668.604,46	Rp. 869.463.474.176,28
2014	Rp. 1.004.767.570.838,00	Rp. 1.004.776.405.244,69
2015	Rp. 104.674.778.235,00	Rp. 112.072.726.547,89

Sumber : DPPKA Kab Tanah Datar

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus mengoptimalkan potensi yang ada agar dana terkumpul dan proses pembangunan berjalan lancar, dan itu semua tidak lepas dari prosedur pemungutannya agar pengelolaan dana tersebut terkontrol sehingga pajak bumi dan bangunan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh Karena itu dari pembahasan diatas maka penulis akan memberi tema **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui kebijakan pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang didapat dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan agar mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah. Untuk mempermudah evaluasi maka permasalahan diatas dengan terperinci dirumuskan singkat sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanah Datar
2. Apakah pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar

Suatu kenyataan bahwa tidak semua sumber pendapatan diberikan kepada daerah, oleh karena itu setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan diharapkan dapat menambah wawasan khususnya dalam bidang perpajakan mengenai potensi dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi Akademik

Sebagai pedoman atau tolak ukur keberhasilan dari proses belajar yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak akademik dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan studi yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan pedoman untuk tahun berikutnya oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa lebih memberikan kontribusi lebih terhadap Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. (Sekaran, 2006). Untuk data sekunder ini penulis peroleh dengan menelaah, dan mengaji literatur-literatur tentang perpajakan yang bersumber dari buku, undang – undang, peraturan-peraturan pemerintah, buletin,

internet dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam laporan tugas akhir ini. Data sekunder ini meliputi :

- a. Data PAD
- b. Data realisasi penerimaan daerah
- c. Data iuran pajak bumi dan bangunan

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

1. Wawancara, yaitu dengan bertanya jawab langsung pada pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini penulis akan sedikit menggambarkan apa saja yang dibahas nantinya dan bagaimana sistem penulisannya sesuai dengan bagian

masing – masing bab dan sistematika pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan sejarah berdirinya kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Datar, tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan struktur organisasi dan tugas masing masing seksi.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan pengertian prosedur, pengertian pajak, fungsi pajak, pajak bumi dan bangunan, kriteria pajak daerah, prosedur pemungutan pajak dan bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menggali potensi-potensi daerah serta realisasi penerimaan pendapatan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan pembahasan yang ada pada Bab III yaitu menggambarkan bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan yang baik dan terkontrol sehingga potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada dapat digali menjadi penyumbang dana untuk pembangunan Kabupaten Tanah Datar.